

## ANALISIS PEMETAAN STATUS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DI KABUPATEN SUKOHARJO

**R. KUNTO ADI**

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

### **ABSTRACT**

*Local Economic Development (LED) revitalization objective to change view of stockholders included of Central Government, Regional Government, Non Government Institution, and community, for Local Economic Development (LED) to be instrument of developing economic activity was based on locally resources for increasing the sustainable of local community welfare.*

*This research aims to give accuracy information for Regional Governmen of Sukoharjo used for make Local Economic Development (LED) action plan for sustainable, in short term, middle term, and long term. The method of this research was descriptive analysis. The analysis method used for Rapid Assesment Techniques For Local Economic Development (RAPID). The output of this research is including output identific of Local Economic Development factors, LED status and LED recommended in Sukoharjo Regency. The location of this research for LED status was Sukoharjo Regency, in accordance with LED frame work of Central Java Province based on developed of business clusters in Local Economic Development (LED) sectors. Object research of LED status was Sukoharjo Regency, whereas respondent are stockholders to hook with Local Economic Development (LED) in Sukoharjo Regency.*

*Based on this research output from RALeD, it can be concluded that Sukoharjo Regency include in well categories viewed from six aspect of LED dimension, namely Target Groups, Location Factor, Synergy and Policy Focused, Sustainable Development, Government System, and Management Process. Unfortunately, based on specific value of many aspect of LED dimension in Sukoharjo Regency, it is still necessary to obtain serious attention from all stockholders particularly LED or FEDEP Forume (Forume Economic Development and Employment Promotion) in Sukoharjo Regency in the future. Therefore, it can increase many aspect of LED dimension to grow Local Economic Development (LED) in Sukoharjo Regency, particularly related with many aspect of PEL dimension, among of Target Groups, Focus and Synergy Policies, Government System, and Management Process.*

*Keywords : Local Economic Development (LED), Mapping, LED Status*

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Pembangunan mengandung makna pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) (Surahman, 2005).

Dalam konteks spasial, proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang. Secara makro, dapat dilihat dari terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara wilayah desa dan kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya. Kesenjangan tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks sangat merugikan bagi keseluruhan proses pembangunan. Potensi konflik menjadi sedemikian besar, yang

## ***R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...***

dikarenakan wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Demikian juga, hubungan antar wilayah telah membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah-wilayah hinterland menjadi lemah yang dikarenakan pengurusan sumber daya yang berlebihan, sedangkan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya juga menjadi lemah karena proses urbanisasi yang luar biasa (Bappenas, 2007).

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang konsisten dengan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai salah satu andalan dalam menghimpun devisa negara. Kenyataan menunjukkan bahwa krisis ekonomi atau krisis moneter pada tahun 1997, yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia, lebih banyak berdampak negatif di perkotaan daripada di daerah pedesaan. Banyak daerah-daerah yang menghasilkan tanaman perkebunan seperti teh, coklat, justru menikmati penghasilan yang besar saat itu. Namun dampak kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan yang umumnya masyarakat petani belum menampilkan lonjakan yang menggembirakan bahkan pada beberapa daerah, kehidupan masyarakat pedesaan semakin terpuruk. Hal tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan perekonomian di pedesaan, khususnya pengembangan ekonomi lokal, selain itu juga dengan adanya sikap pemerintah yang mengabaikan pengembangan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Suparmoko, 2002).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ikut andil secara aktif dalam mensukseskan program pengembangan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program ini lebih diarahkan untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan, karena basis pengembangan ekonomi lokal berada di pedesaan. Pengembangan wilayah di pedesaan akan lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pemasaran hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri *agro-processing* (pengolahan hasil pertanian) skala rumah

tangga, kecil dan menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di pedesaan, serta untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi pemukiman di pedesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar.

Dalam upaya mengatasi berbagai kesenjangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka beberapa potensi dan kelemahan daerah-daerah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ada 4 (empat) strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai kesenjangan yang ada, yaitu 1). Pengembangan sumber daya alam (SDA) dan manusia, 2). Peningkatan sarana dan prasarana, 3). Penguatan kelembagaan dan 4). Penerapan sistem insentif. Pada masa datang, strategi pembangunan harus dimulai dengan basis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan SDA berarti mendorong pembangunan seluruh potensi SDA yang ada di daerah, demikian juga halnya dengan pengembangan SDM.

Pendekatan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah adalah melalui pendekatan pengembangan ekonomi di suatu wilayah berbasis pengembangan potensi komoditas unggulan di daerah yang spesifik lokalita. Salah satu pendekatan dalam upaya pengembangan potensi daerah adalah melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau *Local Economic Development* (LED). Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menurut Bank Dunia adalah proses dimana pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja bersama membentuk kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sesuai dengan definisi tersebut, upaya pengembangan ekonomi lokal tidak semata-mata dilihat dari sisi teknis ekonomi, namun justru mendasarkan pada pendekatan kemitraan

## R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...

dan kerjasama diantara pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Mengacu pada konsep tersebut, maka Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diharapkan sebagai upaya bersama antar pelaku untuk menciptakan dan mengembangkan potensi daerah yang ada. Bagaimana pemerintah daerah, pelaku ekonomi daerah, serta pihak-pihak di tingkat nasional, untuk mendekati pembangunan ekonomi dari sisi yang lain. Bukan makro, bukan sektoral, melainkan berbasis pada pengembangan keunggulan lokal atau daerah, serta difokuskan untuk mengatasi masalah di daerah seperti kemiskinan (Bappenas, 2005).

Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang partisipatif, diharapkan merupakan pendekatan yang *applicable* dan realistis bagi pengembangan ekonomi lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada :

### a. Pemasaran dan Ekspor

Pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya berhenti di tengah jalan. Selain itu, prioritas perlu diberikan kepada kegiatan yang berorientasi ekspor (termasuk ke daerah lain). Ini penting karena pengembangan kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi hanya konsumsi lokal, tidak akan memperbesar "kue", sehingga akibatnya hanya bersifat "zero sum game" (membantu yang satu, mematikan yang lain).

### b. Pengembangan Klaster (*Cluster Development*)

Untuk mendukung pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai kegiatan ekonomi hulu-hilir (*supply chain*) yang efisien dan efektif, agar daya saing produk yang dihasilkan meningkat. Pengembangan ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan *multiplier effect*-nya luas, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh

partisipasi dan *stakeholders* secara luas. Dengan demikian, konsep yang diterapkan akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai kegiatan ekonomi lain.

### c. Kemitraan *Stakeholders*

Mata rantai kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para *stakeholders*-nya. Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik, perlu pemupukan modal sosial (*social capital*) yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara pelaku dan *stakeholders*. Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi, melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah, antar unit/lembaga pemerintahan, serta antar daerah.

### d. Pemberdayaan

Forum kemitraan antar pelaku dan *stakeholders* tersebut tidak akan efektif tanpa adanya "pemberdayaan", yaitu kerelaan dari pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan atau pelaku ekonomi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri, terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Disini, peran pemerintah ialah sebagai "steering rather than rowing". (Arsyad, 1999).

Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) bertujuan untuk mengubah paradigma pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat, terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai instrument untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

Kegunaan kajian ini adalah diharapkan hasil kajian dapat memberikan informasi akurat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat digunakan sebagai landasan

## ***R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...***

dalam penyusunan rencana tindak pengembangan ekonomi lokal secara berkesinambungan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hasil kajian status PEL yang dihasilkan meliputi hasil identifikasi faktor-faktor pengungkit PEL, status PEL dan Rekomendasi PEL Kabupaten Sukoharjo.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah aktual, dimana data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Tujuan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Surakhmad, 1994).

Lokasi kajian status PEL adalah Kabupaten Sukoharjo, yang melaksanakan kegiatan ini sebagai kelanjutan dari komitmen Forum PEL Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program PEL, sesuai dengan *frame work* PEL Jawa Tengah yang berbasis pada pengembangan klaster-klaster usaha dalam sektor Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Jawa Tengah. Sedangkan obyek penelitian status PEL adalah pemangku kepentingan/*stakeholders* yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo. Penentuan responden dalam penelitian/kajian status PEL dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sukoharjo berdasarkan TOR Revitalisasi PEL yang diberikan oleh Direktorat Perekonomian Daerah Bappenas RI. Responden yang terlibat adalah perwakilan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo, kalangan dunia usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM), asosiasi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang terkait dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo, dan selama ini sudah menjadi mitra strategis Bappeda dan FEDEP Kabupaten Sukoharjo

Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi beberapa tahap, meliputi :

1. Sosialisasi Program Revitalisasi PEL, dengan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. Pengembangan dan Perkuatan Kemitraan
  - b. Pengumpulan data, melalui pengisian kuesioner PEL oleh *stakeholders* PEL
  - c. Kajian cepat status PEL Kabupaten Sukoharjo :
2. Pemetaan Status PEL
3. Penetapan Faktor Pengungkit PEL
4. Penyusunan Rencana Tindak PEL

Metode pengolahan data dilaksanakan dengan Excel, dan analisis data menggunakan metode RALED (*Rapid Assesment Techniques For Local Economic Development*), dengan Hexagonal PEL yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara cepat faktor pengungkit dari setiap aspek/dimensi PEL/komponen dari Heksagonal PEL, yang meliputi 1). Kelompok Sasaran, 2). Faktor Lokasi, 3). Kesinergian dan Fokus Kebijakan, 4). Pembangunan Berkelanjutan, 5). Tata Pemerintahan, dan 6). Proses Manajemen. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian status PEL ini yaitu 1). Analisis Deskriptif Statistik yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat biofisik, dengan analisis Tabulasi dan Grafik, dan 2). Analisis RALED (*Rapid Assesment Techniques For Local Economic Development*) yaitu analisis secara cepat terhadap kondisi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dimana metode ini merupakan modifikasi dari Metode Rapfish (*Rapid Appraisal for Fisheries*) yang telah dikembangkan sebelumnya oleh FAO.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan dari keenam aspek/dimensi PEL yang telah dianalisis dengan RALED (Analisis *Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development*, yaitu (1) Dimensi Kelompok Sasaran, (2) Dimensi Faktor Lokasi, (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan, (4) Dimensi Pembangunan Berkelanjutan, (5) Dimensi Tata Pemerintahan, dan (6) Dimensi Proses Manajemen. Hasil analisis RALED ini berupa status dan faktor pengungkit (*lverage factor*) dari masing-masing dimensi PEL

**R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...**

tersebut, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

**1. Dimensi Kelompok Sasaran**

Ditinjau dari dimensi kelompok sasaran, nilai indeks Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai sebesar **57,57** atau berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL antara 50 - 75. Hal ini berarti bahwa dimensi kelompok sasaran dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi **cukup baik**. Nilai dimensi kelompok

sasaran dapat dilihat pada Tabel 1. Meskipun dimensi kelompok sasaran sudah dalam kondisi **cukup baik**, beberapa faktor tetap harus mendapat perhatian untuk diperbaiki. Faktor yang harus diperbaiki ini disebut faktor pengungkit. Agar kondisi menjadi lebih baik lagi, maka faktor Pengungkit (*Leverage Factor*) utama dari dimensi Kelompok Sasaran di Kabupaten Sukoharjo antara lain pelaksanaan beberapa program dan kegiatan.

Tabel 1. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Kelompok Sasaran

No	Aspek Penilaian Kelompok Sasaran	Jumlah	Rata-rata
1	Peraturan ttg kemudahan investasi	50	1,09
2	Informasi prospek bisnis	51	1,11
3	Kepastian berusaha & hukum	33	0,72
4	Keamanan	25	0,54
5	Kampanye peluang usaha melalui :		
	a. Media massa	51	1,11
	b. Kegiatan interaktif	68	1,48
6	Pusat pelayanan investasi dengan jasa layanan konsultasi investasi	39	0,85
7	Upaya fasilitasi permodalan bagi dunia usaha oleh Pemda	39	0,85
8	Promosi produk UKM untuk memperluas pasar oleh Pemda	42	0,91
9	Upaya Pemda untuk peningkatan :		
	a. Teknologi/inovasi	37	0,80
	b. Manajemen usaha	44	0,96
	c. Kelembagaan usaha lokal	46	1,00
10	Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru	49	1,07
11	Pendampingan & monitoring bisnis pelaku usaha baru	42	0,91
12	Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan & keringanan biaya perijinan	17	0,37
13	Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru	29	0,63
	<b>Jumlah</b>	<b>662</b>	<b>14,39</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>41,38</b>	<b>0,90</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

Menurut urutan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Kampanye peluang usaha melalui kegiatan interaktif, (2) Informasi prospek bisnis dan kampanye peluang usaha melalui media massa, (3) Peraturan tentang kemudahan investasi, (4) Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi

pengusaha baru, (5) Upaya pemda dalam peningkatan kelembagaan usaha lokal, (6) Upaya pemda dalam peningkatan manajemen usaha, (7) Promosi produk UKM dari Pemda dan pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru, (8) Upaya fasilitasi permodalan dari Pemda

## R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...

dan Pusat layanan investasi, (9) Upaya pemda dalam peningkatan teknologi, (10) Kepastian berusaha dan hukum, (11) Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru, (12) Keamanan, dan (13) Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan dan keringanan biaya perijinan.

### 2. Dimensi Faktor Lokasi

Hasil analisis RALED terhadap dimensi Faktor Lokasi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai sebesar **64,04** atau berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL antara 50 - 75. Hal ini berarti dimensi Faktor Lokasi dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi **baik**. Nilai dimensi faktor lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Faktor Pengungkit (*Lverage Factor*) utama dari dimensi Faktor Lokasi di Kabupaten Sukoharjo yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut (1) Ketersediaan air bersih, (2) Infrastruktur komunikasi, (3) Sarana transportasi, (4) Kualitas permukiman dan Kualitas pelayanan kesehatan, (5) Kualitas & fasilitas pendidikan dan Aksesibilitas dari Propinsi ke Kabupaten, (6) Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir, (7) Kualitas Lingkungan (8) Tenaga kerja terampil, (8) Infrastruktur energi (9) Aksesibilitas dari kabupaten ke kecamatan (10) Jumlah lembaga keuangan lokal (11) Aksesibilitas dari kecamatan ke desa (12) Lembaga penelitian (13) Akses ke pelabuhan udara (14) Etos kerja SDM dan (15) Akses ke pelabuhan laut.

Dengan melakukan intervensi atau perlakuan terhadap kelima faktor utama tersebut diharapkan dapat meningkatkan status aspek dimensi faktor lokasi kearah yang lebih baik.

### 3. Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan

Hasil analisis RALED terhadap dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan di Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan nilai sebesar **55,50** atau berada di angka

ukuran penilaian dimensi PEL diantara angka 50-75. Hal ini berarti dimensi faktor Kesinergian dan Fokus Kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi **cukup baik**. Nilai dimensi kesinergian dan fokus kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.

Faktor Pengungkit (*lverage factor*) utama dari dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan yang diurutkan berdasarkan urutan prioritasnya adalah sebagai berikut: (1) Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi, (2) Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha, (3) Kebijakan pemberdayaan UKM, kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif serta kebijakan pengembangan komunitas a.l. perbaikan lingkungan, perbaikan kampung, (4) Kebijakan kerjasama antar daerah/Pemda, (5) Kebijakan pengembangan keahlian (kompetensi/ ketrampilan), (6) Kebijakan promosi daerah, (7) Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/industri dan kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal, (8) Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan usaha usaha (CSR), (9) Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan dan perkotaan, (10) Kebijakan peningkatan investasi, (11) Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah, (12) Kebijakan persaingan usaha, dan (13) Kebijakan informasi bursa tenaga kerja. Kelima faktor pengungkit utama tersebut perlu mendapatkan intervensi agar status aspek dimensi kesinergian dan fokus kebijakan di Kabupaten Sukoharjo menjadi baik.

### 4. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Hasil analisis dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai **62,27** atau berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL antara 50 – 75. Hal ini berarti bahwa dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan

Tabel 2. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Faktor Lokasi

No	Aspek Penilaian Faktor Lokasi	Jumlah	Rata-rata
1	Aksesibilitas dari dan ke lokasi :		
	a. Provinsi ke kabupaten	62	1,35
	b. Kabupaten ke kecamatan	51	1,11
	c. Kecamatan ke desa	46	1,00
2	Akses ke pelabuhan laut	25	0,54
3	Akses ke pelabuhan udara	39	0,85
4	Sarana transportasi	64	1,39
5	Infrastruktur komunikasi	68	1,45
6	Infrastruktur energi	52	1,13
7	Ketersediaan air bersih	72	1,57
8	Tenaga kerja terampil	56	1,22
9	Jumlah lembaga keuangan lokal	48	1,04
10	Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir	60	1,30
11	Lembaga penelitian	44	0,96
12	Kualitas permukiman	63	1,37
13	Kualitas Lingkungan	59	1,28
14	Kualitas & fasilitasi pendidikan	62	1,35
15	Kualitas pelayanan kesehatan	63	1,37
16	Fasilitas umum & fasilitasi sosial	62	1,35
17	Etos kerja SDM	35	0,76
	<b>Jumlah</b>	<b>1031</b>	<b>22,41</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>54,26</b>	<b>1,18</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

ekonomi lokal di kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi **baik**. Nilai dimensi pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 4.

Faktor Pengungkit (*leverage factor*) utama dari dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah, (2) Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l. AMDAL), (3) Kebijakan konservasi SDA dalam PEL, (4) Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat lokal, (5) Jumlah perusahaan yang telah melakukan inovasi pengembangan produk dan pasar, (6) PEL mempertimbangkan keberadaan adat & kelembagaan lokal, (7) Sistem industri yang berkelanjutan dan pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri, dan (8) Jumlah perusahaan yang telah memiliki *business plan*.

Untuk meningkatkan status aspek dimensi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo maka dari kelima faktor pengungkit utama tersebut perlu mendapatkan perhatian.

*R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...*

Tabel 3. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Sinergi dan Fokus Kebijakan

No	Aspek Penilaian Kesinergian dan Fokus Kebijakan	Jumlah	Rata-rata
1	Kebijakan peningkatan investasi	44	0,96
2	Kebijakan promosi daerah	51	1,11
3	Kebijakan persaingan usaha	42	0,91
4	Kebijakan pemberdayaan UKM	57	1,24
5	Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah	43	0,94
6	Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi	61	1,33
7	Kebijakan informasi bursa tenaga kerja	41	0,89
8	Kebijakan pengembangan keahlian (kompetensi/ketrampilan)	54	1,17
9	Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan usaha usaha (CSR)	49	1,07
10	Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif	57	1,24
11	Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/industri	50	1,09
12	Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan & perkotaan	47	1,02
13	Kebijakan pengembangan komunitas a.l. perbaikan lingkungan, perbaikan kampung	57	1,24
14	Kebijakan kerjasama antar daerah/Pemda	56	1,22
15	Kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal	50	1,09
16	Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha	58	1,26
	<b>Jumlah</b>	<b>817</b>	<b>17,76</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>51,06</b>	<b>1,11</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 201

Tabel 4. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

No	Aspek Penilaian Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah	Rata-rata
1	Sistem industri yang berkelanjutan	39	0,85
2	Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri	39	0,85
3	Jumlah perusahaan yang telah memiliki business plan	36	0,78
4	Jumlah perusahaan yang telah melakukan inovasi pengembangan produk dan pasar	44	0,96
5	Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup & kesejahteraan masyarakat lokal	45	0,98
6	PEL mempertimbangkan keberadaan adat & kelembagaan lokal	41	0,89
7	Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l. AMDAL)	52	1,13
8	Pengelolaan & pendaur ulangan limbah	56	1,22
9	Kebijakan konservasi SDA dalam PEL	49	1,07
	<b>Jumlah</b>	<b>401</b>	<b>8,72</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>44,56</b>	<b>0,97</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

Tabel 5. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Tata Pemerintahan

No	Aspek Penilaian Tata Pemerintahan	Jumlah	Rata-rata
1	Kemitraan di bidang infrastruktur	47	1,02
2	Kemitraan di bidang promosi dan perdagangan	57	1,24
3	Kemitraan di bidang pembiayaan usaha	54	1,17
4	Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur	34	0,74
5	Restrukturisasi organisasi pemerintah	58	1,26
6	Prosedur pelayanan administrasi publik	51	1,11
7	Status Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis	66	1,44
8	Peran Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis thd perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL	62	1,35
9	Manfaat asosiasi/organisasi bagi anggotanya	58	1,26
<b>Jumlah</b>		<b>487</b>	<b>10,59</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>54,11</b>	<b>1,18</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

### 5. Dimensi Tata Pemerintahan

Hasil terhadap dimensi Tata Pemerintahan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai indeks sebesar **58,82** atau berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL antara 50 - 75. Hal ini berarti bahwa dimensi Tata pemerintahan dalam kondisi **cukup baik**. Nilai dimensi tata pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 5.

Faktor Pengungkit (*lverage factor*) utama dari dimensi Tata Pemerintahan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Status Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis, (2) Peran Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL, (3) Manfaat asosiasi/organisasi bagi anggotanya dan restrukturisasi organisasi pemerintah, (4) Kemitraan di bidang promosi dan perdagangan, (5) Kemitraan di bidang pembiayaan usaha, (6) Prosedur pelayanan administrasi publik, (7) Kemitraan di bidang infrastruktur, dan (8) Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur. Kelima faktor pengungkit utama tersebut perlu mendapatkan intervensi agar

status aspek dimensi tata pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo menjadi baik.

### 6. Dimensi Proses Manajemen

Hasil terhadap dimensi Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai indeks sebesar **56,90** atau berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL diatas angka 50. Hal ini berarti bahwa dimensi Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo adalah **cukup baik**. Nilai dimensi proses manajemen dapat dilihat pada Tabel 6.

Faktor Pengungkit (*lverage factor*) utama dari dimensi Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Identifikasi *stakeholders* PEL, (2) Analisis & pemetaan potensi ekonomi, (3) Jumlah *stakeholders* yang terlibat dalam proses perencanaan PEL, (4) Penilaian terhadap daya saing wilayah dan penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEL, (5) Keterlibatan *stakeholders* dalam proses penyusunan indikator evaluasi, (6) Pemetaan kondisi politis lokal, sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEL dan kesesuaian implementasi dengan perencanaan, (7) Keterlibatan *stakeholders*

**R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...**

dalam proses monitoring dan evaluasi, (8) Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan, (9) Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan, dan (10) Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri (*self evaluation*). Untuk meningkatkan status aspek Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Sukoharjo maka kelima faktor pengungkit utama perlu mendapatkan

perhatian. Dari hasil analisis RALED, dapat disimpulkan bahwa keenam dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo berada pada **kondisi atau status baik** (berada di angka ukuran penilaian dimensi PEL antara 50 – 75). Tidak ada dimensi dari keenam dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal yang dalam kondisi buruk atau nyaris buruk (angka ukuran penilaian dimensi PEL < 50).

Tabel 6. Nilai Rata-rata Pencapaian Dimensi Proses Manajemen

No	Aspek Penilaian Proses Manajemen	Jumlah	Rata-rata
1	Analisis & pemetaan potensi ekonomi	56	1,22
2	Penilaian terhadap daya saing wilayah	47	1,02
3	Pemetaan kondisi politis lokal	45	0,98
4	Identifikasi staholders PEL	62	1,35
5	Penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEL	47	1,02
6	Jumlah stakeholders yang terlibat dalam proses perencanaan PEL	53	1,15
7	Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEL	45	0,98
8	Kesesuaian implementasi dengan perencanaan	45	0,98
9	Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan indikator evaluasi	46	1,00
10	Keterlibatan stakeholders dalam proses monitoring & evaluasi	43	0,94
11	Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri ( <i>self evaluation</i> )	36	0,78
12	Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan	37	0,80
13	Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan	40	0,87
<b>Jumlah</b>		<b>602</b>	<b>13,09</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>46,31</b>	<b>1.01</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

Tabel 7. Status PEL Kabupaten Sukoharjo

No	Aspek PEL	Indeks Aspek PEL	Bobot Gabungan	Jumlah
1	Kelompok Sasaran	57,57	0,20	11,53
2	Faktor Lokasi	64,04	0,27	16,94
3	Kesinergian dan Kebijakan	55,50	0,19	10,71
4	Pembangunan Berkelanjutan	62,27	0,12	7,59
5	Tata Pemerintahan	58,82	0,12	6,77
6	Proses Manajemen	56,90	0,16	9,15
			<b>Jumlah</b>	<b>62,69</b>

Sumber : Analisis Data Primer, 2011

## **R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...**

Meskipun sebagian besar dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal dalam kondisi cukup baik atau baik, tetap diperlukan suatu pembenahan/perbaikan dari setiap dimensi tersebut, meskipun masih diatas nilai 50. Sehingga tetap diperlukan pembenahan/perbaikan, sehingga ke depan kondisinya lebih baik. Secara keseluruhan, nilai status PEL Kabupaten Sukoharjo adalah **baik** dengan nilai total (setelah dikalikan dengan bobot) sebesar **62,69**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan data pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai indeks dari keenam aspek/dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo paling besar yaitu 1). Faktor Lokasi, dan 2). Pembangunan Berkelanjutan, sedangkan aspek/dimensi lain, yaitu 1). Tata Pemerintahan, 2). Kelompok Sasaran, 3). Proses Manajemen, 4). Kesinergian dan Fokus Kebijakan. Hasil analisis tersebut menunjukkan masih perlu perbaikan yang cukup signifikan terutama terkait dengan aspek/dimensi kesinergian dan fokus kebijakan, proses manajemen, kelompok sasaran, dan tata pemerintahan. Sedangkan untuk aspek/dimensi pembangunan berkelanjutan dan faktor lokasi juga masih perlu lebih ditingkatkan lagi dalam upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis RALED, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi berdasarkan rincian nilai dari beberapa dimensi PEL, Kabupaten Sukoharjo yang masih perlu mendapat perhatian yang serius dari semua *stakeholders*/pemangku kepentingan terutama forum PEL/FEDEP Kabupaten Sukoharjo di masa mendatang, sehingga beberapa aspek dimensi PEL tersebut dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo, terutama terkait dengan beberapa dimensi PEL antara lain kelompok sasaran, fokus dan sinergi kebijakan, tata pemerintahan dan proses manajemen.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian cepat status PEL Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diuraikan diatas, terutama berdasarkan beberapa faktor pengungkit dan urutan prioritas faktor pengungkit yang telah ditemukan pada setiap aspek/dimensi PEL, maka diperoleh beberapa rekomendasi dari setiap aspek/dimensi PEL, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan strategis dan rencana tindak yang lebih implementatif, dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) terutama dalam penyusunan Program Kerja dalam upaya PEL di Kabupaten Sukoharjo di masa mendatang. Rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan kajian status PEL, sebagai berikut :

#### **Dimensi Kelompok Sasaran :**

- a. Kampanye peluang usaha dan informasi bisnis (UMKM/KUBE, koperasi), melalui media massa, pameran, *show room*, dan media promosi lain
- b. Kemudahan perijinan dan peraturan tentang kemudahan investasi
- c. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru/UMKM
- d. Perkuatan kelembagaan dan manajemen usaha UMKM
- e. Fasilitasi permodalan dari lembaga terkait pembiayaan (Perbankan, LKM, Koperasi, BMT) dan Pemda, terutama melalui Kredit Program (KUR, KKPE, dan lain-lain)
- f. Fasilitasi dalam peningkatan akses teknologi produksi, melalui pelatihan-pelatihan teknis produksi bagi UMKM

#### **Dimensi Faktor Lokasi :**

- a. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih, infrastruktur energi, dan kualitas lingkungan
- b. Peningkatan Infrastruktur komunikasi dan sarana dan prasarana transportasi
- c. Peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan kualitas & fasilitasi pendidikan
- e. Peningkatan akses peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir, melalui program integrasi antar sentra/klaster UMKM dan sinergi dengan lembaga penelitian (Perguruan Tinggi) dan dinas/departemen (BPTP, Balitbang)

## R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...

- f. Peningkatan tenaga kerja terampil dan etos kerja SDM terutama tenaga kerja UMKM
- g. Peningkatan jumlah lembaga keuangan lokal untuk meningkatkan akses UMKM terhadap lembaga pembiayaan

### Dimensi Sinergi dan Fokus kebijakan

- a. Optimalisasi pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi, antar sentra UMKM melalui *integrated system* (integrasi antar sentra/klaster UMKM) dengan fasilitasi dan pendampingan dari *stakeholders* terkait dalam FEDEP Kabupaten Sukoharjo
- b. Optimalisasi upaya pemberdayaan UMKM melalui sinergi kebijakan pengembangan UMKM antar dinas terkait dan *stakeholders* terkait lain (PT, Perbankan, dunia usaha/UMKM, koperasi, LKM, dan lain-lain)
- c. Optimalisasi kerjasama antar daerah/Pemda, dalam upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Sukoharjo, terkait dengan akses bahan baku, produksi, pemasaran dan perijinan.
- d. Optimalisasi pengembangan keahlian (kompetensi/ketrampilan) bagi UMKM
- e. Optimalisasi upaya promosi daerah, terutama produk unggulan Kabupaten Sukoharjo, melalui pameran skala lokal, regional, nasional dan internasional, dan *show room* bersama produk unggulan Kabupaten Sukoharjo
- f. Optimalisasi upaya pembangunan kawasan industri hinterland/industri dan kebijakan tata ruang pengembangan ekonomi lokal
- g. Optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan usaha usaha (CSR), terutama terkait akses pembiayaan dari BUMN

### Dimensi Pembangunan Berkelanjutan :

- a. Peningkatan upaya pengelolaan & pendaur ulangan limbah UMKM, AMDAL, konservasi SDA, dan lain-lain
- b. Peningkatan inovasi pengembangan produk dan pasar bagi UMKM, dengan berorientasi pada sistem industri yang berkelanjutan dan pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri, serta peningkatan manajemen

usaha UMKM, melalui pelatihan produksi (inovasi produk dan manajemen usaha)

### Dimensi Tata Pemerintahan

- a. Optimalisasi peran dan fungsi Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis (klaster, FEDEP, asosiasi pengusaha : ASMINDO, asosiasi pertanian organik, kelompok tani dan lain-lain) secara internal dan eksternal
- b. Optimalisasi peran dan fungsi Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis (klaster, FEDEP, asosiasi pengusaha : ASMINDO, asosiasi pertanian organik, kelompok tani dan lain-lain) terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL
- c. Optimalisasi peran dan fungsi Asosiasi Industri/Komoditi/Forum Bisnis (klaster, FEDEP, asosiasi pengusaha : ASMINDO, asosiasi pertanian organik, kelompok tani dan lain-lain) dalam hal kemitraan di bidang promosi dan perdagangan, pembiayaan usaha, infrastruktur.

### Dimensi Proses Manajemen

- a. Optimalisasi peran *stakeholders* FEDEP dalam PEL dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program PEL
- b. Upaya pemetaan potensi ekonomi UMKM
- c. Optimalisasi proses manajemen PEL secara berkelanjutan, dalam hal perencanaan, implementasi dan evaluasi PEL

Berdasarkan rekomendasi sebagaimana diatas, dapat disusun Rencana Tindak sebagai berikut :

- a. Perkuatan kelembagaan (*Capacity Building*) Forum PEL/FEDEP dan Forum Rembug Klaster Kabupaten Sukoharjo, dengan lebih mengoptimalkan forum dialog secara lebih intensif dan partisipatif, dengan melibatkan para pemangku kepentingan/*stakeholders*, sehingga pengembangan UMKM lebih terkoordinasi dengan baik, terkait dengan kebijakan pengembangan UMKM antar SKPD terkait; perencanaan, implementasi dan evaluasi program kerja klaster UMKM.
- b. Deregulasi peraturan dan kebijakan terkait dengan kemudahan investasi, pengelolaan lingkungan, SOP standarisasi produksi, pengolahan, dan penanganan produksi, dan pelayanan publik, meliputi kemudahan perijinan usaha melalui sistem *One Stop Service* (OSS) secara lebih optimal,

## R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...

- keringanan pajak investasi, dan transparansi pajak/retribusi.
- c. Penyediaan data base potensi usaha, terutama UMKM secara berkesinambungan
  - d. Promosi dan pemasaran produk klaster UMKM unggulan Kabupaten Sukoharjo secara periodik dan berkesinambungan, baik di tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional, baik melalui fasilitasi pembangunan *show room* bersama produk klaster UMKM, UKM Center, web site produk klaster UMKM dan web site Bappeda/FEDEP Kabupaten Sukoharjo, dan media promosi (leaflet, katalog, banner, TV-Nasional, *National Discovery*, Majalah-majalah Internasional, dan lain-lain), temu usaha/bisnis, outlet dan lapak bagi UMKM, serta fasilitasi pameran dagang/expo bagi produk unggulan klaster UMKM.
  - e. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan infrastruktur, misal sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan), infrastruktur energi (listrik, air), dan komunikasi (telephon, fax, jaringan internet)
  - f. Peningkatan kemampuan SDM, terutama SDM klaster UMKM, melalui pelatihan-pelatihan teknis produksi (inovasi produk), manajemen usaha (manajemen keuangan, pemasaran), Teknologi Informasi, dengan berbagai program pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan
  - g. Pengembangan jaringan usaha antar klaster UMKM (Klaster Pertanian Terpadu : sub klaster pertanian organik, tahu, jamur, ternak sapi, makanan olahan), Klaster Meubel Kayu dan Rotan, Klaster Batik dan Tenun Lurik), melalui *integrated system* antar sub klaster, melalui kerjasama antar sub klaster terkait dengan penyediaan bahan baku, teknologi produksi, inovasi produk, standar kualitas produk (sertifikasi), kelembagaan, dan pemasaran produk, dengan fasilitasi dan pendampingan dari *stakeholders* terkait dalam FEDEP Kabupaten Sukoharjo, melalui sinergi kemitraan strategis antar dinas terkait dan *stakeholders* terkait lain (Perguruan Tinggi, Perbankan, dunia usaha/UMKM, koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi, Swasta/BUMN (CSR/LPDB/PKBL), Lembaga Donor Internasional, dan lain-lain). Sinergi tersebut diharapkan juga antar wilayah se-SOLO RAYA.
  - h. Fasilitasi pembiayaan bagi klaster UMKM, melalui bantuan modal usaha dengan bunga ringan, baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, CSR/PKBL- BUMN, perbankan umum, lembaga keuangan daerah, koperasi, lembaga donor internasional, penjaminan kredit bagi klaster UMKM, serta fasilitasi subsidi bunga dari sumber APBD kepada UMKM yang prospektif
  - i. Mengoptimalkan peran perusahaan daerah (Perusda) melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
  - j. Intervensi kebijakan pengembangan pedesaan/perkotaan melalui program-program pembangunan pedesaan dan perkotaan (PNPM) secara lebih optimal.
  - k. Penguatan asset UMKM dan akses reformasi bagi UMKM melalui sertifikasi tanah, terutama tanah-tanah produktif bagi petani dan pelaku usaha lain, dengan perbaikan sistem dan mekanisme sertifikasi tanah, yang lebih mudah, murah dan transparan; penyediaan tanah bagi petani dan pelaku usaha lain, dengan kebijakan penatagunaan tanah yang lebih terarah dan partisipatif, antara lain dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan implementasinya secara konsisten, termasuk dalam perijinan lokasi bagi investasi, untuk mengurangi alih fungsi lahan dari penggunaan lahan untuk pertanian ke penggunaan non pertanian, sehingga tercapai penyediaan tanah produktif bagi UMKM, termasuk petani.

### DAFTAR PUSTAKA

- Surahman. 2005. Kaitan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan Pertanian. *Jurnal Penduduk dan Pembangunan. Volume 5, no 1.*
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* BPFE-UGM. Yogyakarta.

***R. Kunto Adi: Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (Pel) di...***

- Bappenas. 2005. *Panduan Pembangunan : Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta.
- Bappenas, 2007. *Manual Operasional Penentuan Status dan Faktor Pengungkit Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta
- Suparmoko, M.. 2002. *Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. BPFE. Yogyakarta.